

Dimensi Sosial-budaya Menuju Indonesia Baru¹

Oleh M. Fajrul Falaakh²

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, selama setahun terakhir, telah mengakibatkan kondisi yang tidak menyenangkan, terutama yang menyangkut nasib rakyat kebanyakan: menurunnya daya beli masyarakat, terancamnya nasib anak-anak akibat kekurangan gizi, menipisnya persediaan pangan, terputusnya hubungan kerja dan sempitnya kesempatan memperoleh nafkah, atau meningkatnya kriminalitas dan tindak kekerasan. Kondisi ini telah mengakibatkan meluasnya keresahan dan ketegangan sosial. Bahkan, disentuh oleh “politik kriminal” dan “ideologi sektarian”, keresahan dan ketegangan itu sempat memicu kerusuhan etnik dan primordial dengan sasaran utama kelompok minoritas Cina dan non-Muslim.

Keadaan yang tak menyenangkan itu telah diungkapkan pula dalam berbagai unjuk rasa yang menuntut reformasi politik, hukum dan ekonomi, maupun pernyataan dan sikap umum berbagai kekuatan independen dalam masyarakat (*independent civil society*) akan perlunya perbaikan atas berbagai sendi kehidupan kebangsaan Indonesia. Salah satu jawaban atas tuntutan reformasi itu ialah berhentinya Soeharto dari jabatan kepresidenan, untuk dilanjutkan oleh BJ Habibie. Sekarang, Habibie mewarisi berbagai kondisi sosial, ekonomi dan politik yang menyertai peralihan kekuasaan dari Soeharto kepadanya.

Kondisi yang menyertai transisi kekuasaan (dari Soeharto ke Habibie) itu membawa serta berbagai pandangan dan tuntutan yang beranekaragam, bahkan dapat saling berlawanan. Ini dapat menjurus kepada kondisi politik yang disintegratif, yang akan memperparah nasib hidup rakyat banyak di tengah terpuruknya perekonomian nasional (pertumbuhan ekonomi -14%, nilai tukar rupiah bertengger di atas Rp.10,- ribu/dolar, puluhan juta PHK dan pengangguran, defisit anggaran, dll.).

Mebiarkan kesemua itu berlangsung tanpa penyelesaian segera, justru mengurangi kredibilitas pemerintah dan akan berlanjut kepada proses delegitimasi politik: *political leverage* tidak terwujud, dan pemerintahan cenderung tidak efektif. Ini hanya dapat segera diselesaikan melalui pemilihan umum, di mana parlemen dan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu itu diakui sebagai hasil aktualisasi kedaulatan rakyat. Tanpa melalui cara ini maka kredibilitas pemerintahan Habibie masih mengandung kelemahan dan legitimasi politiknya kurang, sehingga akan mengalami kesulitan terus dalam menciptakan kondisi yang diperlukan bagi upaya perbaikan ekonomi nasional.

Di sisi lain, berbagai potensi kemasyarakatan sebaiknya menyadari perlunya meneguhkan wawasan dan sikap kemanusiaan untuk peduli terhadap nasib rakyat banyak, menggalang kebersamaan untuk memperbaiki kondisi kehidupan dalam rangka aktualisasi potensi kemanusiaan di tengah konteks sosial yang berubah.

Upaya berskala lintas-batas primordial perlu dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat pada umumnya, baik dari ancaman atas pemenuhan kebutuhan dasar maupun dari kecenderungan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dengan demikian solidaritas kebangsaan (dalam makna sosial, ekonomis maupun politis) harus tetap dijaga, sehingga kemajemukan masyarakat tidak berkembang menjadi habitat yang subur bagi munculnya keterpecahan sosial.

¹ Pokok-pokok pikiran untuk Seminar “Menyiasati Pembangunan Orde Rakyat dengan Kepemimpinan Berbudaya Nusantara”, dalam rangka Reuni Alumni GMNI DIY dan sekitarnya, Gedung MM-UGM, 4 Juli 1998.

² Mohammad Fajrul Falaakh, SH., MA., Msc., Ketua Tanfidziyah PBNU & staf pengajar Fakultas Hukum UGM.